

NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 13 NO. 2 NOVEMBER 2022 Terakreditasi Nomor: 164/E/KPT/2021 E-ISSN: 2614-2813
P-ISSN: 2087-295X

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	iii-vi
Abstrak.....	vii-xiii
Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan <i>Vis-a-Vis</i> Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers Prianter Jaya Hairi	145-165
Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, Ardhana Christian Noventri, Kadek Anda Gangga Putri	167-183
Rekonstruksi Politik Hukum Sistem Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah Vani Wirawan, Yusriyadi, Ana Silviana, Yeni Widowaty	185-207
Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi Utiyafina Mardhati Hazhin, Marchety Riwani Diaz	209-226
Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional Ayon Diniyanto	227-245
<i>Judicial Activism</i> dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi Dicky Eko Prasetyo, Adam Ilyas	247-265
Indeks	
Pedoman Penulisan	

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Negara Hukum merupakan jurnal yang memuat hasil kajian dan hasil penelitian berbagai permasalahan hukum. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Juni dan November. Publikasi Jurnal Negara Hukum dilakukan setelah melalui proses review dari Mitra Bestari dan seleksi berdasarkan keputusan rapat Redaksi. Jurnal Negara Hukum edisi November 2022 merupakan volume 13 nomor 2, memuat 6 (enam) tulisan, yang merupakan kajian-kajian di bidang hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum perdata. Beberapa permasalahan hukum yang diulas, meliputi:

Pertama, “Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan *Vis-a-Vis* Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers”, ditulis oleh Prianter Jaya Hairi. Dalam artikel tersebut, dikatakan bahwa pengaturan pasal di dalam RUU KUHP terkait perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden dinilai berpotensi mengancam hak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi. Di sisi lain, pembentuk undang-undang juga memiliki *raison d’etre* yang merupakan urgensi pengaturan pasal. Artikel ini mengupas secara mendalam arti penting dari pengaturan substansi pasal tersebut, sekaligus mengkaji potensi persinggungan dengan hak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Kajian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan metode analisis data yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasal mengenai perbuatan penyerangan harkat dan martabat presiden atau wakil presiden masih tetap diperlukan/urgen untuk diatur kembali dalam RUU KUHP. Namun dengan catatan, perlu penyesuaian terhadap beberapa penjelasan pasal. Selain itu, bahwa secara umum, konstruksi pasal-pasal tersebut tidak dapat dikatakan telah menyalahi prinsip-prinsip HAM terkait hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Namun demikian, jaminan perlindungan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers masih tetap perlu dipertegas dalam RUU KUHP. Karena kenyataan di lapangan selama ini, menunjukkan masih terjadi salah penerapan dalam penegakan hukum terkait pasal-pasal sejenis pasal penghinaan.

Kedua, “Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga” merupakan artikel yang ditulis oleh Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, Ardhana Christian Noventri, dan Kadek Anda Gangga Putri. Artikel ini menguraikan salah satu kekhususan dalam tindak pidana KDRT, yang terletak pada ketentuan Pasal 55 UU PKDRT. Pasal tersebut mensyaratkan minimal alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu cukup dengan keterangan saksi korban ditambah dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, ketika dalam pembuktian dapat menghadirkan seorang saksi selain saksi korban, maka keterangan saksi dan keterangan saksi korban sudah dianggap sebagai alat bukti yang cukup dalam persidangan. Namun, dalam implementasinya, upaya penguatan alat bukti saksi dalam UU PKDRT belum diimbangi dengan pengaturan yang lengkap, yaitu terkait dengan berlakunya Pasal 168 KUHP dalam UU PKDRT. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini menganalisis kedudukan saksi dalam hukum pidana dan kedudukan saksi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk meninjau peran keterangan saksi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT dan bagaimana hukum mengatur hal tersebut. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam menjawab permasalahan tersebut. Dengan banyaknya kasus KDRT yang terjadi tiap harinya dan sulitnya pengumpulan alat bukti untuk membuktikan tindak pidana KDRT, maka perlu memformulasikan pengaturan keterangan saksi dalam tindak pidana KDRT baik melalui PERMA maupun revisi UU PKDRT.

Ketiga, “Rekonstruksi Politik Hukum Sistem Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah”, ditulis oleh Vani Wirawan, Yusriyadi, Ana Silviana, dan Yeni Widowaty. Para penulis mengemukakan bahwa pertumbuhan investasi dan ekonomi dapat terhambat dengan keberadaan mafia tanah. Hal ini dikarenakan kejahatan tersebut merupakan kasus pertanahan berdimensi luas, sehingga mengakibatkan sengketa, konflik, dan perkara dengan objek tanah dan ruang yang bernilai ekonomis tinggi. Untuk itu, diperlukan pencegahan yang dimulai dari tingkat administratif. Penelitian ini mengkaji rekonstruksi politik hukum sistem pendaftaran tanah yang ideal sebagai upaya pencegahan mafia tanah. Dengan demikian, diharapkan dapat menemukan tujuan dari *ius constituendum* dalam sistem pendaftaran tanah yang mampu melakukan pencegahan kejahatan mafia tanah dari tingkat administratif. Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal research* yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan alternatif konstruksi politik hukum baru bagi sistem pendaftaran tanah sebagai upaya pencegahan mafia tanah pada masa mendatang dari tingkat administratif. Rekonstruksi politik hukum tersebut berupa pembaharuan hukum pendaftaran tanah menjadi sistem publikasi positif. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap UUPA, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem publikasi negatif. Selain itu, perubahan tersebut perlu diimbangi dengan penerapan sistem pendaftaran tanah secara elektronik, dengan produk hukum berupa sertipikat elektronik dan tetap mengedepankan prinsip *good governance*. Artikel ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah segera mungkin melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian kasus pertanahan, khususnya tentang pencegahan mafia tanah, dan DPR RI untuk pengesahan RUU Pertanahan.

Keempat, “Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi”, ditulis oleh Utiyafina Mardhati Hazhin dan Marchety Riwani Diaz. Artikel ini menguraikan, bahwa Asuransi Jiwa Kresna merupakan perusahaan yang pernah dijatuhkan putusan PKPU oleh hakim pengadilan niaga. Dalam kasus tersebut pemohon PKPU adalah pemegang polis, yang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan. Meski demikian, PKPU dalam kasus ini berakhir dengan disahkannya perjanjian perdamaian (homologasi) antara Asuransi Jiwa Kresna dengan pemegang polisnya. Sementara itu, kreditor lain yang tidak sepakat dengan perjanjian yang telah dihomologasi mengajukan upaya pembatalan ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung pun mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan memutus PKPU Asuransi Jiwa Kresna batal demi hukum. Tulisan ini mengkaji implikasi hukum putusan kasasi terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna, dan efektivitas bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis pasca putusan kasasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa putusan kasasi telah mengakibatkan perjanjian yang menjadi dasar pemegang polis untuk menuntut pembayaran Asuransi menjadi batal. Hal itu justru merugikan pemegang polis karena tidak mendapatkan kepastian pembayaran utangnya. Untuk mewujudkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pemegang polis, diperlukan pembenahan, seperti perlunya memperbaiki aturan terkait asuransi *unit link* mulai dari tata kelola, transparansi hingga optimalisasi sistem perlindungan hukum terhadap pemegang polis, dan merealisasikan dibentuknya Lembaga Penjamin Polis.

Kelima, “Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional” merupakan artikel yang ditulis oleh Ayon Diniyanto. Dalam latar belakang artikel ini disebutkan bahwa isu penundaan Pemilu menjadi perdebatan di ruang publik, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah penundaan Pemilu dapat diwujudkan di Indonesia? Pertanyaan tersebut muncul karena konstitusi tidak mengatur penundaan Pemilu. Ini menjadi problem bagi Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional dan negara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peluang terjadinya penundaan Pemilu di negara hukum; penundaan Pemilu dalam kacamata

demokrasi konstitusional; dan formulasi penundaan Pemilu yang konstitusional dan komprehensif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal, dengan pendekatan hukum, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan menyatakan bahwa peluang penundaan Pemilu di negara hukum dapat dilakukan secara konstitusional dan non-konstitusional. Secara konstitusional dilakukan dengan amandemen konstitusi. Secara non-konstitusional dilakukan dengan mengeluarkan dekrit dan membangun konvensi ketatanegaraan. Jika penundaan Pemilu dilakukan di Indonesia saat ini, akan bertentangan dengan demokrasi konstitusional. Untuk itu, perlu ada formulasi norma dalam konstitusi yang mengatur mengenai penundaan Pemilu dan *constitutional deadlock*. Simpulan artikel ini menyatakan bahwa peluang penundaan Pemilu di negara hukum dapat dilakukan dengan cara konstitusional dan non-konstitusional; penundaan Pemilu di Indonesia bertentangan dengan demokrasi konstitusional; dan perlu ada formulasi norma yang menyelesaikan *constitutional deadlock* dalam konstitusi. Untuk itu, MPR disarankan melakukan amandemen konstitusi dalam rangka mencegah *constitutional deadlock*.

Keenam, "*Judicial Activism* dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi, merupakan artikel ditulis oleh Dicky Eko Prasetyo dan Adam Ilyas. Pengujian undang-undang (UU) ratifikasi selama ini masih menimbulkan polemik terkait boleh atau tidaknya dilakukan *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kedudukan UU ratifikasi terkait pengujian konstitusionalitas oleh MK. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari bentuk dan urgensinya, UU ratifikasi memiliki kedudukan yang sederajat dengan UU biasa sehingga secara hukum UU ratifikasi merupakan bagian dari frasa "undang-undang" yang merupakan objek pengujian dari MK. Dilihat dari konsep *judicial activism*, keaktifan hakim diperlukan dalam pengujian UU ratifikasi berdasarkan konsep *the law is non transferability of law* agar UU ratifikasi yang merupakan hasil perjanjian internasional tidak bersifat "sub-ordinasi" bagi hukum nasional. Oleh karena itu, pengujian UU ratifikasi dapat dilakukan di MK dengan cara penafsiran secara ekstensif atas frasa "undang-undang" sehingga bukan hanya meliputi UU biasa, namun juga termasuk UU ratifikasi. Selain itu, pengaturan ke depan mengenai pengujian UU ratifikasi maka MK perlu melakukan *judicial activism* yaitu upaya progresif dan substantif untuk menguji kesesuaian antara UU ratifikasi dengan konstitusi. Hal ini dalam praktiknya, ke depan dapat dilakukan dengan upaya *judicial preview* sebagai upaya hukum MK menguji UU ratifikasi.

Hasil kajian dan penelitian yang dimuat di dalam Jurnal Negara Hukum ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang hukum bagi pembaca, serta dapat menjadi referensi untuk pembuatan kebijakan atau kajian lanjutan. Redaksi terbuka menerima masukan dan saran dari pembaca untuk meningkatkan kualitas jurnal ini. Selamat membaca.

Jakarta, November 2022

Redaksi

NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 13 NO. 2 NOVEMBER 2022 Terakreditasi Nomor: 164/E/KPT/2021 E-ISSN: 2614-2813
P-ISSN: 2087-295X

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan *Vis-a-Vis* Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers

Prianter Jaya Hairi

Abstrak

Pengaturan pasal di RUU KUHP terkait perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden mendapat kritik. Pasal tersebut dinilai berpotensi mengancam hak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi. Di sisi lain, pembentuk undang-undang juga memiliki *raison d'être* yang merupakan urgensi pengaturan pasal. Artikel ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam arti penting dari pengaturan substansi pasal tersebut, sekaligus mengkaji bagaimana potensi persinggungan dengan hak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Kajian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan metode analisis data yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasal mengenai perbuatan penyerangan harkat dan martabat presiden atau wakil presiden masih tetap diperlukan/urgen untuk diatur kembali dalam RUU KUHP. Namun dengan catatan, perlu penyesuaian terhadap beberapa penjelasan pasal. Selain itu, bahwa secara umum, konstruksi pasal-pasal tersebut tidak dapat dikatakan telah menyalahi prinsip-prinsip HAM terkait hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Namun demikian, jaminan perlindungan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers masih tetap perlu dipertegas dalam RUU KUHP. Karena kenyataan di lapangan selama ini, menunjukkan masih ada terjadi salah penerapan dalam penegakan hukum terkait pasal-pasal sejenis pasal penghinaan.

Kata kunci: penghinaan; presiden; kebebasan berpendapat; kebebasan pers

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

**Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, Ardhana Christian Noventri,
Kadek Anda Gangga Putri**

Abstrak

Salah satu kekhususan dalam tindak pidana KDRT terletak pada ketentuan Pasal 55 UU PKDRT. Pasal tersebut mensyaratkan minimal alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu cukup dengan keterangan saksi korban ditambah dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, ketika dalam pembuktian dapat menghadirkan seorang saksi selain saksi korban, maka keterangan saksi dan keterangan saksi korban sudah dianggap sebagai alat bukti yang cukup dalam persidangan. Namun pada implementasinya, upaya penguatan alat bukti saksi dalam UU PKDRT belum diimbangi dengan pengaturan yang lengkap terutama berkaitan dengan alat bukti saksi, yaitu berlakunya Pasal 168 KUHAP dalam UU PKDRT. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan menganalisis kedudukan saksi dalam hukum pidana dan kedudukan saksi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk meninjau peran keterangan saksi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT dan bagaimana hukum mengatur hal tersebut. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Dengan banyaknya kasus KDRT yang terjadi tiap harinya dan sulitnya pengumpulan alat bukti untuk membuktikan tindak pidana KDRT, maka perlu memformulasikan pengaturan keterangan saksi dalam tindak pidana KDRT baik melalui PERMA maupun revisi UU PKDRT.

Kata kunci: KDRT; keterangan saksi; pembuktian

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Rekonstruksi Politik Hukum Sistem Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah

Vani Wirawan, Yusriyadi, Ana Silviana, Yeni Widowaty

Abstrak

Pertumbuhan investasi dan ekonomi dapat terhambat dengan keberadaan mafia tanah. Hal ini dikarenakan kejahatan tersebut merupakan kasus pertanahan berdimensi luas, sehingga mengakibatkan sengketa, konflik, dan perkara dengan objek tanah dan ruang yang bernilai ekonomis tinggi. Untuk itu, diperlukan pencegahan yang dimulai dari tingkat administratif. Penelitian ini ingin mengkaji rekonstruksi politik hukum sistem pendaftaran tanah yang ideal sebagai upaya pencegahan mafia tanah. Dengan demikian, diharapkan dapat menemukan tujuan dari *ius constituendum* dalam sistem pendaftaran tanah yang mampu melakukan pencegahan kejahatan mafia tanah dari tingkat administratif. Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal research* yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan alternatif konstruksi politik hukum baru bagi sistem pendaftaran tanah sebagai upaya pencegahan mafia tanah pada masa mendatang dari tingkat administratif. Rekonstruksi politik hukum tersebut berupa pembaharuan hukum pendaftaran tanah menjadi sistem publikasi positif. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap UUPA, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem publikasi negatif. Selain itu, perubahan tersebut perlu diimbangi dengan penerapan sistem pendaftaran tanah secara elektronik, dengan produk hukum berupa sertipikat elektronik dan tetap mengedepankan prinsip *good governance*. Artikel ini memberi rekomendasi kepada pemerintah segera mungkin melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian kasus pertanahan, khususnya tentang pencegahan mafia tanah, dan DPR RI untuk pengesahan RUU Pertanahan. Kata kunci: rekonstruksi; politik hukum; pendaftaran tanah; pencegahan; mafia tanah

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi

Utiyafina Mardhati Hazhin, Marchety Riwani Diaz

Abstrak

Asuransi Jiwa Kresna merupakan perusahaan yang pernah dijatuhkan putusan PKPU oleh hakim pengadilan niaga. Dalam kasus tersebut pemohon PKPU adalah pemegang polis, yang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan. Meski demikian, PKPU dalam kasus ini berakhir dengan disahkannya perjanjian perdamaian (homologasi) antara Asuransi Jiwa Kresna dengan pemegang polisnya. Sementara itu, kreditor lain yang tidak sepakat dengan perjanjian yang telah dihomologasi mengajukan upaya pembatalan ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung pun mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan memutus PKPU Asuransi Jiwa Kresna batal demi hukum. Tulisan ini mengkaji bagaimana implikasi hukum putusan kasasi terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna, dan bagaimana efektivitas bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis pasca putusan kasasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa putusan kasasi telah mengakibatkan perjanjian yang menjadi dasar pemegang polis untuk menuntut pembayaran Asuransi menjadi batal. Hal itu justru merugikan pemegang polis karena tidak mendapatkan kepastian pembayaran utangnya. Untuk mewujudkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pemegang polis, diperlukan pembenahan, seperti perlunya memperbaiki aturan terkait asuransi *unit link* mulai dari tata kelola, transparansi hingga optimalisasi sistem perlindungan hukum terhadap pemegang polis, dan merealisasikan dibentuknya Lembaga Penjamin Polis.

Kata kunci: asuransi; kepailitan; penundaan kewajiban pembayaran utang; Asuransi Jiwa Kresna

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional

Ayon Diniyanto

Abstrak

Isu penundaan Pemilu menjadi perdebatan di ruang publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penundaan Pemilu dapat diwujudkan di Indonesia? Pertanyaan tersebut muncul karena konstitusi tidak mengatur penundaan Pemilu. Ini menjadi problem bagi Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional dan negara hukum. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini, yaitu: (1) bagaimana peluang terjadinya penundaan Pemilu di negara hukum?; (2) bagaimana penundaan Pemilu dalam kacamata demokrasi konstitusional?; dan (3) bagaimana formulasi penundaan Pemilu yang konstitusional dan komprehensif? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal, dengan pendekatan hukum, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan menyatakan bahwa peluang penundaan Pemilu di negara hukum dapat dilakukan secara konstitusional dan non-konstitusional. Secara konstitusional dilakukan dengan amandemen konstitusi. Secara non-konstitusional dilakukan dengan mengeluarkan dekrit dan membangun konvensi ketatanegaraan. Jika penundaan Pemilu dilakukan di Indonesia saat ini, akan bertentangan dengan demokrasi konstitusional. Untuk itu, perlu ada formulasi norma dalam konstitusi yang mengatur mengenai penundaan Pemilu dan *constitutional deadlock*. Simpulan artikel ini menyatakan bahwa peluang penundaan Pemilu di negara hukum dapat dilakukan dengan cara konstitusional dan non-konstitusional; penundaan Pemilu di Indonesia bertentangan dengan demokrasi konstitusional; dan perlu ada formulasi norma yang menyelesaikan *constitutional deadlock* dalam konstitusi. Untuk itu, MPR disarankan melakukan amandemen konstitusi dalam rangka mencegah *constitutional deadlock*.

Kata kunci: *constitutional deadlock*; demokrasi; negara hukum; penundaan pemilu

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi

Dicky Eko Prasetio, Adam Ilyas

Abstrak

Pengujian undang-undang (UU) ratifikasi selama ini masih menimbulkan polemik terkait boleh atau tidaknya dilakukan *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kedudukan UU ratifikasi terkait pengujian konstitusionalitas oleh MK. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari bentuk dan urgensinya maka UU ratifikasi memiliki kedudukan yang sederajat dengan UU biasa sehingga secara hukum UU ratifikasi merupakan bagian dari frasa “undang-undang” yang merupakan objek pengujian dari MK. Dilihat dari konsep *judicial activism*, keaktifan hakim diperlukan dalam pengujian UU ratifikasi berdasarkan konsep *the law is non transferability of law* supaya UU ratifikasi yang merupakan hasil perjanjian internasional tidak bersifat “sub-ordinasi” bagi hukum nasional. Oleh karena itu, pengujian UU ratifikasi dapat dilakukan di MK dengan cara penafsiran secara ekstensif atas frasa “undang-undang” sehingga bukan hanya meliputi UU biasa, namun juga termasuk UU ratifikasi. Selain itu, pengaturan ke depan mengenai pengujian UU ratifikasi maka MK perlu melakukan *judicial activism* yaitu upaya progresif dan substantif untuk menguji kesesuaian antara UU ratifikasi dengan konstitusi. Hal ini dalam praktiknya, ke depan dapat dilakukan dengan upaya *judicial preview* sebagai upaya hukum MK menguji UU ratifikasi.

Kata kunci: UU ratifikasi; *judicial activism*; *constitutional review*

NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 13 NO. 2 DESEMBER 2022 Terakreditasi Nomor: 164/E/KPT/2021 E-ISSN: 2614-2813
P-ISSN: 2087-295X

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Attacking the Honor and the Dignity of the President: The Urgency of Regulation Vis-a-Vis Freedom of Expression and the Press

Prianter Jaya Hairi

Abstract

The articles regulation in the Bill of the Criminal Code regarding acts of attacking the honor and dignity of the president has been criticized. Some articles are considered to have the potential to threaten the right to freedom of expression and freedom of the press, which are part of the human rights guaranteed by the Constitution. On the other hand, legislators also have a raison d'être as the urgency of regulation. This study aims to explore in depth the significance of the substantial regulation of the articles, as well as to examine some potential conflicts with the right to freedom of expression and freedom of the press. This study is a type of normative legal research, with data analysis methods carried out with a qualitative approach to secondary data. The results of the analysis show that the articles concerning acts attacking the honor and dignity of the president or vice president still needed/urgent to be re-formulate in the Bill of the Criminal Code. However, it should be noted that it is necessary to adjust some of the explanations of the articles. In addition, the general construction of these articles cannot be said to have violated human rights principles related to the right to freedom of expression and freedom of the press. However, there should be an assurance that protecting the freedom of expression and freedom of the press still needs to be emphasized in the Bill of the Criminal Code. So far, the reality shows that there are still poor implementations in law enforcement related to some articles, such as articles on contempt.

Keywords: contempt; president; freedom of expression; freedom of the press

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Regulation on Witness Statements Standing in Criminal Acts of Domestic Violence

**Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, Ardhana Christian Noventri,
Kadek Anda Gangga Putri**

Abstract

One thing specific in the criminal acts of domestic violence lies in the provisions of Article 55 of the PKDRT Law. The article requires minimal evidence to prove the defendant's guilt, which is ample in the form of the victim's witness statement plus other related evidence. Therefore, when the examination can bring a witness other than the victim's witness, the testimony of the witness and the testimony of the victim's witness are considered ample evidence in the trial. However, in its implementation, efforts to strengthen another witness statement as a piece of evidence in the PKDRT Law have not been balanced with complete arrangements, especially with regard to the witness's evidence, namely the enactment of Article 168 of the Criminal Procedure Code in the PKDRT Law. Based on this background, this study will analyze the position of witnesses in criminal law and the position of witnesses in criminal acts of domestic violence. This study aims to review the role of witness statements in law enforcement against domestic violence crimes and how the law regulates it. The normative legal research method is used to answer these problems. With the increased number of cases of domestic violence that occur every day and the difficulty of collecting evidence to prove the crime of domestic violence, it is necessary to formulate the regulation of witness statements in the crime of domestic violence either through PERMA or the revision of the PKDRT Law.

Keywords: domestic violence; witness statement; proof

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Reconstruction of Legal Politics of Land Registration System as Land Mafia Prevention Efforts

Vani Wirawan, Yusriyadi, Ana Silviana, Yeni Widowaty

Abstract

*Investment and economic growth can be inhibited by the existence of the land mafia. This is because the land case crime has broad dimensions, resulting in disputes, conflicts, and involves land and space objects of high economic value. For this reason, prevention is needed starting at the administrative level. This study wants to examine the legal and political reconstruction of the ideal land registration system as an effort to prevent land mafia. Thus, it is expected to find the purpose of the *ius constituendum* in the land registration system that is able to prevent land mafia crimes starting at the administrative level. This study is socio-legal research with analytical descriptive nature. This study produces a new alternative to legal political construction for the land registration system as an effort to prevent land mafia in the future, starting at the administrative level. The legal political reconstruction is in the form of reforming the land registration law into a positive publication system. Therefore, it is necessary to revise the Agrarian Principles Law, especially the articles related to the negative publication system. In addition, these changes need to be balanced with the application of an electronic land registration system, with legal products in the form of electronic certificates and still prioritizing the principles of good governance. This study provides recommendations to the government at the earliest opportunity to establish legislation for the settlement of land cases, especially regarding the prevention of land mafia, and to the DPR RI for the ratification of the Bill on Land.*

Keywords: *reconstruction; politics of law; land registration; prevention; land mafia*

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

The Effectiveness of Legal Protection for Kresna Life Insurance Policyholders Post-Cassation Decision

Utiyafina Mardhati Hazhin, Marchety Riwani Diaz

Abstract

Kresna Life Insurance is a company that has been handed down a Suspension of Debt Payment ruling by a commercial court judge. In that case, the Suspension applicant is the policyholder, who, based on Law No. 37 of 2004, does not have the power to submit an application. However, the Suspension ended with the ratification of a peace agreement (homologation) between Kresna Life Insurance and the policyholder. In the interim, other creditors who do not agree with the homologated agreement filed an appeal to cancel it at the cassation level. The Supreme Court also granted the appeal and decided that the Kresna Life Insurance Suspension was null and void. This study examines the legal implications of the cassation decision on the Kresna Life Insurance policyholder and the effectiveness of the form of legal protection for policyholders after the cassation decision. This study is normative research using secondary data in the form of laws, regulations, and court decisions. The results of this study state that the cassation decision has resulted in the agreement, which is the basis for the policyholder to demand insurance payments to be cancelled. This is detrimental to policyholders because they do not get certainty of paying their debts. To ensure the effectiveness of legal protection for policyholders, improvements are needed, such as the need to improve regulations related to unit link insurance ranging from governance and transparency to optimizing the legal protection system for policyholders and realizing the establishment of an Insurance Policy Guarantee Agency.

Keywords: insurance; bankruptcy; suspension of debt payment obligations; Kresna Life Insurance

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

General Elections Postponement in Rule of Law: A Study of Constitutional Democracy

Ayon Diniyanto

Abstract

The issue of postponing the general election has become a public debate. This raises the question; can the postponement of the general election be realized in Indonesia? The question arises because the constitution does not regulate the postponement of the general election. This is a problem for Indonesia as a constitutional democracy and a state with the rule of law. The research problem in this study are: (1) what are the chances of postponing the general election in a state with the rule of law? (2) how does constitutional democracy view the postponement of the general election? and (3) what is the formulation of a constitutional and comprehensive postponement of the general election? This study uses doctrinal research with a legal approach, a concept approach, and a case approach. The results of the discussion state that the possibility of postponing the general election in a state with the rule of law can be held constitutionally and non-constitutionally. It is constitutionally carried out with constitutional amendments. Non-constitutionally, it is held by issuing decrees and establishing constitutional conventions. If the postponement of general elections is carried out in Indonesia at this time, it would be contrary to constitutional democracy. For this reason, it is necessary to formulate norms in the constitution which regulate the postponement of general elections and constitutional deadlocks. The conclusion of this study states that the possibility of postponing the general election in a state with the rule of law can be done by constitutional and non-constitutional means; postponement of general elections in Indonesia is contrary to constitutional democracy, and there is a need to have a formulation of norms that resolve the constitutional deadlock in the constitution. For this reason, the MPR is advised to amend the constitution in order to prevent constitutional deadlock.

Keywords: constitutional deadlock; democracy; the rule of law; election postponement

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Judicial Activism in Reviewing the Constitutionality of the Ratification Law

Dicky Eko Prasetyo, Adam Ilyas

Abstract

The review of the ratification law still raises polemics regarding whether or not a ratification law can be constitutionally reviewed at the Constitutional Court. Therefore, this study will examine the position of ratification law related to constitutionality review by the Constitutional Court. The research method used is normative juridical research, with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that judging from its form and urgency, the ratification law has an equal position with ordinary laws. Hence, the ratification law is part of the phrase "law" which is the object of review by the Constitutional Court. Assessing from the concept of judicial activism, the activeness of judges is needed in reviewing the ratification law based on the concept of the law is non-transferability of law so that the ratification law, which is the result of international agreements, is not "sub-ordinated" to national law. Therefore, the review against the ratification law can be carried out in the Constitutional Court by means of extensive interpretation of the phrase "law" so that it includes not only ordinary laws but also ratification laws. In addition, in future arrangements regarding the review of the ratification law, the Constitutional Court needs to carry out judicial activism, namely a progressive and substantive effort to review the compatibility between the ratification law and the constitution. In practice, this can be done in the future by means of a judicial preview as a legal effort for the Constitutional Court to review the ratification law.

Keywords: ratification law; judicial activism; constitutional review